

SUARA AKADEMIK

Kritikan: Antara Akademisi Dan Pejabat

Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si

Guru Besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU

Permintaan untuk dikritik dan mohon saran serta pengakuan tidak sempurna sebuah karya ilmiah hampir mewarnai semua buku yang ditulis oleh berbagai ahli atau akademisi. Meskipun penulis adalah seorang pakar atau guru besar dalam bidang ilmu tertentu ia masih merasakan adanya sisi kelemahan dari karya tulisnya. Hal itu juga sebagai wujud pengakuan bahwa ada orang lain yang lebih pakar dan lebih ahli dari dirinya. Itulah sikap ilmiah –budaya akademik- yang berkembang di kalangan ilmuwan atau para akademisi dari dulu hingga sekarang ini.



Di sini saya ingin memberi contoh dua karya guru besar dan mereka dengan rendah hati mengatakan tentang kelemahan karyanya. Pertama, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dalam Sekapur Sirih karya monumentalnya yaitu Tafsir Al-Mishbah. Ia mengatakan: *"Mudah-mudahan buku ini dapat merupakan sumbangan kecil dalam keperpustakaan Al-Qur'an di tanah air, dan mudah-mudahan peminat studi Al-Qur'an dapat menyempurnakannya"*. Kedua, Prof. Dr. Syahrin Harahap dalam pengantar buku terbarunya berjudul Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna. Ia menulis: *"Saya sadar bahwa yang dituliskan di sini baru sekelumit dari kedalaman kesempurnaan ajaran Islam, yang semoga dapat disempurnakan oleh kitab-kitab lain. Kalau dalam kitab ini ditemukan kelemahan dan kesalahan oleh para pembaca, dengan hati terbuka saya menerima segala koreksi dan saran"*.

Adalah sangat berbeda dengan sikap sebahagian Pejabat Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Daerah di Indonesia dewasa ini. Mereka elergi dengan kritikan, saran dan masukan dari masyarakat atau rakyatnya. Terdapat beberapa kritikan dan pertanyaan masyarakat yang tidak direspon dengan proporsional. Pertama, masalah kedekatan dan kemesraan pemerintah Indonesia dengan pemerintah China. Kedua, kenapa tenaga kerja asing –khususnya dari China- mudah masuk ke Indonesia. Mereka sebahagian illegal dan sudah bekerja antara lain di lahan pertanian di Kota Bogor. Terkesan kehadiran dan aktivitas mereka lepas dari kontrol pemerintah, padahal Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Bukanlah rakyat masih kekurangan lapangan pekerjaan dan masih banyak pengangguran di negeri ini.

Ketiga, kenapa pemerintah menaikkan beberapa kebutuhan masyarakat dalam waktu bersamaan, yaitu listrik, BBM, STNK dan BPKB. Keempat, kenapa pemerintah terkesan membela Ahok, yang menurut fatwa MUI pusat adalah menistakan agama Islam. Sementara para penista agama Islam sebelumnya tidak ada keberpihakan pemerintah. Selain empat pertanyaan di atas, sebenarnya masih terdapat 101 pertanyaan lainnya yang perlu klarifikasi dan dijawab oleh pemerintah. Namun terkesan pemerintah membiarkan berbagai pertanyaan itu.

Menyampaikan kritikan dan memberikan pendapat di negara demokrasi adalah dibolehkan. Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 menjamin warga negara menyampaikan pendapat dalam bentuk kritikan dan saran guna untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyediakan diri untuk dikritik sebagaimana kesediaan para akademisi, sehingga negara ini tidak terkesan mengarah kepada pemerintahan yang otoriter.